



SUJANARKO RESMI JABAT KETUA DEWAN

## Walikota Siap 'Ekspose' APBD Perubahan

**YOGYA (KR)** - Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku siap menggelar rapat ekspose APBD Perubahan di hadapan anggota dewan. Menurutnya APBD Perubahan cukup mendesak untuk dibahas demi kepentingan masyarakat banyak.

Hal itu diungkapkan Haryadi saat ditemui usai rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah dan janji Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta periode 2014-2019 di gedung dewan setempat, Kamis (18/9). "Jika dewan menghendaki rapat ekspose, dari dulu kami sudah siap," terangnya.

Rapat ekspose tersebut guna menjabarkan persoalan-persoalan mendesak dan harus segera diatasi dengan APBD Perubahan. Sehingga hanya persoalan tersebut yang nantinya dibahas dan disetujui oleh dewan. Pasalnya jika harus membedah seluruh materi program yang diajukan dalam APBD Perubahan, maka waktu yang tersisa sudah tidak memungkinkan.

Sesuai tata kala anggaran daerah, batas waktu penetapan APBD Perubahan ialah tiga bulan sebelum tahun anggaran selesai. Dengan demikian, paling lambat 30 September 2014 harus sudah ada persetujuan bersama antara legislatif dengan eksekutif. "Harapan kami terhadap Pimpinan Dewan yang baru ini bisa membangun hubungan harmonis. Kerja sama dan kemitraan antara legislatif dan eksekutif sangat menopang keberhasilan pembangunan," papar Haryadi.

Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta, M Ali Fahmi mengaku, permohonan rapat ekspose itu sempat diusulkan oleh sejumlah fraksi. Pihaknya akan membahas usulan tersebut dalam rapat pimpinan yang akan digelar Jumat (19/9) hari ini. Sedangkan penetapan APBD Perubahan, semua anggota dewan memiliki semangat yang sama agar dilakukan tepat waktu.

Sementara menurut Ketua DPRD Kota Yogyakarta yang baru saja resmi dilantik, Sujanarko, tahapan penetapan APBD Perubahan sebenarnya masih panjang. Hal ini karena laporan pertanggung jawaban APBD 2013 sama sekali belum dibahas dan alat kelengkapan (alkap) dewan juga belum terbentuk. "Kami tetap berkomitmen menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Masih ada waktu meski nanti setiap hari tanpa jeda akan ada paripurna untuk mengejar APBD Perubahan," ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya juga meminta seluruh anggota dewan melihat kepentingan rakyat yang sangat mendesak. Dinamika yang terjadi di internal dewan harus diselesaikan dengan merujuk aturan perundangan yang berlaku. (Dhi)-a



KRI-Ardhi Wahdan  
Yogyakarta

1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	anjut
					anggapi
					etahui
					rs

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005